

PELAKSANAAN UNSUR BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK

BUREAUCRACY IMPLEMENTATION AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL RECORD OF SIAK DISTRICT

Hernimawati¹, Surya Dailiati², Sudaryanto³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

sudaryantofia@unilak.ac.id

Abstrak: Pemerintah Kabupaten Siak memiliki organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 477.670 jiwa maka aparatur sipil negeri Kabupaten Siak perlu bersungguh-sungguh menjalankan tugas agar pelayanan berjalan dengan baik dan benar. Masalah yang masih terjadi hingga saat ini adalah masih terdapat ruang kosong yang belum termanfaatkan secara baik dan benar. Kemudian jumlah pegawai yang belum memadai dalam mengurus administrasi kependudukan dan kurangnya komunikasi dalam mengurus atau mengambil administrasi kependudukan. Manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan agar birokrasi dapat berjalan dengan baik. Menurut Mas'ud Said (2012), ada lima unsur birokrasi yang harus dipenuhi agar dikatakan sebagai birokrasi yang sehat yakni; struktur organisasi, visi dan misi, personel atau pejabat, fasilitas pendukung dan kepemimpinan birokrasi. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan diketahui birokrasi sudah berjalan dengan baik, hanya menjadi hambatan adalah fasilitas pendukung birokrasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Birokrasi dan Dinas

Abstract: *The Siak Regency Government has regional apparatus organizations in carrying out the wheels of government, one of which is the Department of Population and Civil Registration. With a population of 477,670 people, the civil servants of Siak Regency need to seriously carry out their duties so that services run properly and correctly. The problem that still occurs today is that there is still empty space that has not been utilized properly and correctly. Then the number of employees who are not adequate in managing population administration and lack of communication in managing or taking population administration. Human resource management is needed so that the bureaucracy can run well. According to Mas'ud Said (2012), there are five elements of bureaucracy that must be met in order to be said to be a healthy bureaucracy, namely; organizational structure, vision and mission, personnel or officials, supporting facilities and bureaucratic leadership. From the research activities carried out, it is known that the bureaucracy has been running well, the only obstacle being the supporting facilities of the bureaucracy.*

Keywords: *Implementation, Bureaucracy and Service*

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan proses dari kebijakan publik yang bersifat krusial karena harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan berjalan efektif (Subekti dkk, 2017||). Pemerintahan berkelas dunia adalah pengakuan terbaik dari berbagai Negara terhadap penetapan standar yang

berkualitas dalam rancangan, kinerja, kualitas, kepuasan pelanggan hingga nilai etika, dengan melihat beberapa indikator seperti kesejahteraan rakyat serta kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah (Adiperdana, 2017). Sudiadnyane, (2018) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar yuridis penyelenggaraan

pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Siak memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disiduk Capil) Kabupaten Siak memiliki tugas pokok dalam memberikan dukungan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

Di satu sisi, masyarakat mulai menyadari akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran/ Kematian. Ini dilakukan dalam upaya penegakan hukum administrasi kependudukan serta mempermudah mengetahui status kependudukan seseorang, mencegah kepemilikan status kependudukan ganda, mengetahui jumlah penduduk laki-laki/ perempuan, angka kelahiran/ kematian,

perkawinan, perpindahan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam menjalankan tugasnya, Disduk Capil Kabupaten Siak memiliki sumber daya manusia (SDM) dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 36 orang dan honorer atau pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 40 orang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN).

Pelayanan pendaftaran penduduk dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi *smart phone/ online* melalui whatApps dengan nomor yang tertera di majalah dinding (mading) kantor desa. Selanjutnya pegawai yang ditunjuk memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi baik itu Kartu Keluarga, Kartu Idenitas Anak (KIA). Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dilakukan oleh kepala seksi dan dilanjutkan oleh kepala bidang dan diberikan oleh kepala dinas. Selanjutnya petugas pengabilan kartu memberikan kepada masyarakat. Berkas yang sudah diberikan selanjutnya diarsipkan guna meminimalisir hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan pencetakan dan bukti telah melakukan pendaftaran.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Minas	16.856	16.097	32.953
2	Sungai Mandau	4.854	4.578	9.432
3	Kandis	38.399	36.450	74.849
4	Siak	14.381	13.896	28.277
5	Kerinci Kanan	14.817	13.852	28.669
6	Tualang	67.875	63.859	131.464
7	Dayun	17.254	15.957	33.211
8	Lubuk Dalam	10.923	10.647	21.570
9	Koto Gasib	11.776	11.372	23.148
10	Mempura	9.151	8.776	17.927
11	Sungai Apit	15.541	15.301	30.842
12	Bunga Raya	13.751	13.147	26.898
13	Sabak Auh	6.196	6.090	12.286
14	Pusako	3.211	2.933	6.144
	Jumlah	244.985	232.685	477.670

Sumber: Siakkab.bps.go.id

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 477.670 jiwa maka aparatur sipil negeri (ASN) Kabupaten Siak perlu bersungguh-sungguh menjalankan tugas agar pelayanan berjalan dengan baik dan benar. Masalah yang masih terjadi hingga saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di unit/ bagian layanan administrasi. Akibatnya, seorang pegawai bisa menangani beberapa kegiatan yang menyebabkan keterlambatan seperti verifikasi data dan pengarsipan kartu kependudukan.

Berdasarkan kondisi diatas jelas bahwa, fungsi dari Disduk Capil Kabupaten Siak menumbuhkan minat masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan sangat besar. Fungsi lainnya adalah meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, melengkapi data administrasi penduduk, diproses dengan cepat dan akurat menggunakan sistem komputerisasi. Hanya saja yang menjadi permasalahan dari pengamatan yang dilakukan yakni:

1. Masih terdapat ruang kosong yang belum dimanfaatkan secara baik dan benar.
2. Jumlah pegawai yang belum memadai dalam mengurus administrasi kependudukan sementara jumlah penduduk yang mengurus administrasi termasuk banyak, sebagaimana Tabel 1 Jumlah Penduduk Siak.
3. Kurangnya komunikasi dalam mengurus atau mengambil administrasi kependudukan.

METODE

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Informan ataupun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang kumpulkan langsung dari

informan yang terpilih dalam penelitian ini. Dalam kegiatan penelitian kualitatif yang menjadi Aparatur pemerintah informasi adalah para informan (subjek) yang kompeten, mempunyai relevansi dengan *setting* sosial yang diteliti. Sedangkan tempat yang menjadi elemen dari situasi sosial adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, media cetak, atupun media elektronik, dokumen administrasi, penelitian sebelum atau lainnya yang terkait. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah, guna mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan pada peraturan Perundangan tertentu (Fahturrahman, 2016). Faktor birokrasi pembagian kerja dalam implementasi kebijakan publik, menunjukkan pelaku-pelaku ahli dan profesional dalam tindakan-tindakan mengimplementasikan kebijakan publik (Ariyani dkk, 2014).

Kelambanan proses pelayanan di birokrasi seringkali dilakukan dengan berlindung di balik aturan dan prosedur formal yang terkadang sangat sulit untuk dapat dipenuhi oleh warga masyarakat. Masih terikat oleh aturan-aturan yang berbelit-belit, yang sebetulnya dapat disederhanakan, belum transparan sehingga kejelasan pelayanan menjadi kabur; belum memihak pada kepentingan rakyat, dan belum bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Birokrasi masih terkurung dalam budaya kerja yang bersandar pada mentalitas “minta petunjuk” pimpinan dalam setiap gerak langkahnya, sehingga banyak pola pengambilan keputusan pelayanan yang dirasa sangat lamban dan merugikan masyarakat pengguna layanan (Simaela dkk, 2019).

Unsur-unsur pokok birokrasi perlu dipahami dan sangat berguna bagi kita untuk memberikan analisa. Birokrasi tidak bisa dibayangkan sebagai suatu elemen yang tunggal, sebagaimana kendaraan yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan dan membentuk suatu mata rantai satu sama lainnya. Sebagai suatu kesatuan sistem, tugas utama birokrasi agar tujuan organisasi menjai kenyataan. Birokrasi harus menjadi penterjemah dari yang sangat abstrak menjadi kongkrit. Jembatan penterjemah pertama yang harus dibutuhkan ialah bangunan organisasi. Begitu pula yang terjadi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan diketahui birokrasi sudah berjalan dengan baik, hanya menjadi hambatan adalah fasilitas pendukung birokrasi.

Budiman & Akhmaddhian (2014) menyatakan Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya.

Ini dapat dilihat dari fasilitas yang masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan admimistrasi. Dari segi internal kantor atau organisasi masih terdapat keterbatasan komputer, kursi dan meja kantor. Padahal dinas ini memiliki kantor sendiri yang relatif dapat dikatakan

besar. Hanya saja masih terdapat ruang-ruang kosong yang belum termanfaat dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pengaadn fasilitas birokrasi dan tata kelola ruangan sehingga menjadi lebih indah.

Sedangkan dari segi eksternal kantor atau layanan masyarakat, ruang tunggu yang representatif belum ditemui. Akibatnya, masyarakat harus menunggu dibawah-bawah pohon dan antri yang terlalu ramai dan panjang untuk pengurusan administrasi. Idealnya dengan adanya fasilitas birokrasi, maka tidak terjadi kelihatan adanya kerumunan masyarakat dan termanfaatkannya ruang terbuka hijau yang bisa menjadi tempat beristirahat atau menunggu panggilan layanan administrasi.

Bangunan organisasi yang formal dan permanen sangat diperlukan untuk berjalannya birokrasi secara rutin dan proses yang panjang. Arah tujuan yang kongkrit beserta tugas kerja yang kongkrit inilah yang akan menjadi pemandu bagi kinerja organisasi. Arah tujuan dan tugas kerja yang kongkrit ini disebut sebagai visi dan misi organisasi. Selanjutnya bagaimana wadah (organisasi), visi dan misi tidak sekedar menjadi konseptual belaka namun sungguh-sungguh bekerja dibutuhkan personil atau pejabat birokrasi yang terpilih.

Tahapannya selanjutnya bagaimana menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh para personalia agar membantu memudahkan dalam penyelenggaraan tugas kerja secara nyata. Tugas kerja secara nyata ini juga memerlukan kepemimpinan. Kepemimpinan akan akan mengorganisir bagaimana kinerja secara keseluruhan bisa selaras dan mendukung tercapainya tujuan.

1. Struktur Organisasi

Menurut Mas'ud (2012) birokrasi ada untuk mengerjakan tugas-tugas rutin pemerintahan dalam rangka untuk

mencapai tujuan hidup bersama. Karena tujuan hidup bersama luas dan besar maka dibutuhkan sebuah pengorganisasian untuk bisa mencapainya. Begitu pula yang terjadi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak memiliki empat bidang yaitu pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Fungsi dinas ini untuk menumbuhkan minat masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas, melengkapi data administrasi sebagai upaya penegakan hukum administrasi. Data diproses dengan cepat dan akurat dengan sistem komputerisasi. Karena tugas yang begitu besar dan luas maka mau tak mau dibutuhkan pengorganisasian. Esensi dari organisasi terletak pada kerjasama diantara individu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan cara berbagi tugas. Secara alamiah, semua orang mempunyai bakat berorganisasi karena tidak mungkin mengerjakan pekerjaan sendiri. Begitu pula yang terjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, diperlukan bantuan kerja sama dari orang lain.

Jadi, berorganisasi lahir dari kebutuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat atau bahkan mustahil untuk dikerjakan oleh seorang individu secara sendirian. Organisasi yang diterapkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sudah sesuai semangat otonomi daerah. Struktur organisasi juga ditampilkan di ruang kerja sebagai informasi dan petunjuk bagi pihak – pihak berkepentingan.

Bukan organisasi yang membentuk manusia, namun manusialah yang menjadi pembentuk organisasi. Struktur organisasi ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dibuat dengan pendekatan fungsional, memusatkan seluruh perhatian kepada kegiatan-kegiatan manusia sebagai organisator. Denah-denah organisasi dipaparkan di ruangan tertentu sesuai kebutuhan.

Dengan organisasi itu, pegawai yang ada bekerja sama berbagi tugas satu sama lain, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang besar dan luas pada akhirnya bisa terselesaikan. Pekerjaan sendiri berarti pengubahan dan atau pengolahan atas sesuatu. Jadi dengan organisasi, pegawai dinas mengerjakan kerja-kerja perubahan dan atau pengolahan yang besar dan luas, yang mungkin jika dikerjakan secara individual akan butuh waktu dan energi yang besar.

Dengan struktur organisasi yang ada masing-masing pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti Kepala Bidang Pemanfaatan Dana Dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi.

2. Visi Dan Misi

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi sementara misi adalah cara mencapai tujuan tersebut. Visi yang ingin dicapai Di

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak adalah terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkualitas menuju tertib administrasi kependudukan Kabupaten Siak. Sedangkan misi yang diupayakan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pelayanan kependudukan, meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka penegakan hukum administrasi kependudukan, melaksanakan pembangunan *data base* kependudukan yang valid akurat dan *up to date*, melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Visi dan misi merupakan mercusuar bagi organisasi birokrasi yang akan memberikan penerangan mau kemana sebenarnya dan apa yang harus dilakukan untuk sampai ke tujuan. Menurut Mas'ud Said (2012), pemahaman yang kuat akan visi dan misi ini sesungguhnya sangat terkait dengan sifat birokrasi yang rasional. Birokrasi rasional mendasarkan gerak langkahnya pada sebuah ide tertentu mengenai masa depan yang akan dituju, dan untuk menuju masa depan itu dibutuhkan pengorganisasi kerja.

Oleh karena itu pemahaman akan visi merupakan pemahaman akan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh gerak birokrasi. Sementara pemahaman akan misi akan memberikan pemahaman akan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai masa depan tersebut.

Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sesuai dengan peraturan daerah. Kemudian visi dinas ini juga disinkronkan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak. Kepala dinas beserta jajaran juga turut serta mensosialisasikan visi dan misi secara lisan mau tulisan. Secara lisan dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung atau penyampaian saat rapat dan pertemuan

penting lainnya. Sedangkan secara tulisan dalam bentuk penulisan di dinding kantor, pemasangan spanduk dan lainnya, sehingga visi dan misi tidak hanya dipahami oleh aparat tapi juga masyarakat.

3. Personal

Personal atau pejabat birokrasi menjadi unsur pokok ketiga dari birokrasi ialah personalia pelaksana. Seperti dikatakan oleh Robert dan Kreitner dalam Mas'ud Said, faktor manusia adalah kunci bagi keberhasilan dalam organisasi. Orang-oranglah yang menjadi penentu utama dari usaha terorganisir, tak peduli bagaimanapun besar atau tujuan dari organisasi-organisasi tersebut. Mereka inilah yang akan menggerakkan organisasi birokrasi dalam realitas nyata.

Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak mencapai 76 orang yang terdiri atas 40 orang honorer dan 36 orang pegawai negeri sipil. Tugas pokok dinas ini memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk misalnya, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penerbitan dokumen penduduk dan pelaksanaan kebijakan. Pelayanan pendaftaran penduduk dilaksanakan secara online melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera di majalah dinding setiap kantor desa, memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan pembuatan kartu keluarga, kartu identitas anak.

Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh kepala seksidan dilanjutkan oleh kepala bidang untuk diberikan kepada kepala dinas sehingga dapat mencetak tanggal kartu keluarga dan petugas pengambilan kartu keluarga bertugas memberikan berkas yang sudah dicetak kepada masyarakat

dengan membawa berkas pendaftaran penduduk secara online tersebut untuk diarsipkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti apabila adanya kesalahan cetak kartu keluarga, dan sebagai bukti telah terdaftarnya warga.

Selain itu Bidang Pendaftaran Penduduk juga bertugas melegalisir kartu keluarga, kartu tanda penduduk, untuk urusan kepentingan berkas masyarakat lainnya. Warga bisa saja mengurus berkas untuk menjadi pegawai negeri sipil, polisi, tentara, melamar pekerjaan, pembelian rumah/ sepeda motor/ mobil atau kendaraan lainnya.

4. Fasilitas

Fasilitas ini dibutuhkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak agar aparatur sipil negara atau personel pelaksana bisa menjalankan tugas kerja secara optimal. Secara ringkas fasilitas pendukung itu bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Fasilitas pendukung operasional kerja: seperti gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas dan sebagainya. Pada intinya fasilitas ini adalah fasilitas berupa barang atau mesin untuk mendukung operasional kerja sehari-hari dari aparatur birokrasi. Untuk ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sudah memiliki sendiri dan termasuk megah.
- b. Fasilitas pendukung insentif kerja: seperti gaji, tunjangan pensiun dan sebagainya. Fasilitas ini adalah fasilitas pendukung yang mendukung semangat dan loyalitas kerja dari aparatur birokrasi. Mengenai Gaji, Bintoro dalam Mas'ud Said (2012) mengatakan, secara ideal gaji pegawai dan sistemnya harus memenuhi tiga unsur yaitu adil, cukup dan merangsang serta berorientasi pada prestasi kerja. Karen menjadi pegawai negeri diharapkan merupakan suatu karir dalam hidup, maka perlu kiranya gaji

yang wajar dihubungkan dengan beratnya beban tugas, tanggung jawab, kualifikasi, prestasi kerja, lamanya menjabat dan tingkat biaya hidup. Dari insentif kerja ini maka Kabupaten Siak termasuk yang terbesar di Riau khususnya dan Indonesia umumnya.

- c. Fasilitas pendukung administrasi kerja: seperti sistem akuntansi, sistem pengawasan, sistem pelaporan dan sebagainya. Pada intinya, fasilitas ini berupa sistem yang bisa menjadi alat ukur dan alat kontrol objektif yang bisa membantu aparatur birokrasi untuk menilai dan mengawasi kerja dan kinerjanya secara keseluruhan sebagai aparatur birokrasi. Penerapannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dalam bentuk layanan pengadaan secara elektronik, absen digital dan penggunaan layanan berbasis online. Begitu pula yang biasa terjadi pembayaran gaji dengan sistem transfer, tidak manual.

Artinya, dinas ini sudah berangsur memenuhi fasilitas kerja baik secara manual maupun digital. Kedepannya tentu perlu lebih ditingkatkan lagi namun tidak melupakan kondisi masyarakat yang tidak semuanya melek dengan teknologi.

5. Kepemimpinan

Unsur ini bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir keempat unsur yang lainnya sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama lain. Pemimpin tidak hanya menggerakkan orang-orang, namun juga terutama sekali menggerakkan orang-orang agar bekerja secara efektif dan bermutu.

Dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Kemudian dalam lingkup organisasi ini,

Sekretaris Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina dan mengendalikan administrasi umum dan keuangan, sarana prasarana dan ketenagaan.

Oleh karena itu selain memiliki pengetahuan psikologi tentang orang-orang yang dipimpinnya, pemimpin juga harus memiliki pengetahuan teknis, paling tidak secara mendasar tentang teknologi di bidang yang menjadi kerjanya. Sebab menurut Mas'ud Said (2012), tanpa pengetahuan teknis tentang psikologi dan teknologi, maka ada bahaya bahwa pemimpin akan mengambil kebijakan yang salah atau membaca situasi secara salah.

Dengan demikian pada akhirnya membawa birokrasi ke kinerja yang buruk. Jadi pengetahuan teknis disini membantu pemimpin dalam memilih kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang harus dipilihnya diantara sekian banyak pilihan. Para pemimpin di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak yang terdiri atas kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang sudah menjalankan perannya, hanya saja dalam pemanfaatan ruang perlu bekerjasama, koordinasi sehingga tidak banyak ruang kosong yang terabaikan. Perlu keahlian dibidang seni, keindahan sehingga bisa menjadi fasilitas yang ada menjadi lebih menarik. Sebab fasilitas yang ada dimanfaatkan masyarakat dalam pengurusan administrasi sehingga perlu memberi kesan nyaman. Artinya, pimpinan dinas harus mampu membaca situasi dan bertindak sesuai dengan kondisi yang ada. Pemimpin birokrasi yang ideal adalah pemimpin yang sanggup membaca apa yang tengah terjadi di lingkungan birokrasinya dan kemudian sanggup merumuskan solusinya.

SIMPULAN

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan yakni Pelaksanaan birokrasi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhi struktur organisasi, visi dan misi, personal atau sumberdaya manusia, fasilitas dan kepemimpinan. Sedangkan hambatan yang dipenuhi adalah dari segi fasilitas seperti ruang tunggu yang masih belum memadai di dalam ruangan dan diluar ruangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiperdana, A., & Ak, M. B. A. (2017). Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Revolusi Mental Birokrasi Sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia. *Pendayagunaan Aparatur Negara*, 18.
- Ariyani, D., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(2).
- Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2014). Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Fahturrahman, M. (2016). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14-27.
- Mas'ud Said. (2012). Birokrasi Di Negara Birokratis, UMM Press, Malang.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi

- dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Simaela, D. R., Lewerissa, C. M., & Selvius, D. (2019). Implementasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire. *JIPEM Jurnal Kajian Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah*, 1(1), 60-79.
- Sudiadnyane, I. M. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(60).